

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional umumnya terfokus pada pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan upaya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang menyentuh lapisan masyarakat. Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah yang mencakup provinsi, kabupaten maupun kota merupakan alat ukur kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan kualitas dan standar hidup. Tujuan utama pembangunan nasional yaitu agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah merupakan tujuan dari pembangunan. Terlaksananya pembangunan nasional tidak luput campur tangan dari masyarakat dan pemerintahan. Masyarakat selaku pelaku dalam pembangunan tersebut, sedangkan pemerintah sebagai pengarah hingga pengontrol agar nantinya dapat tercipta suasana yang saling menunjang satu sama lain.

Pembangunan ekonomi tentu tidak lepas dengan pertumbuhan ekonomi karena sifatnya yang selalu berdampingan. Pembangunan ekonomi daerah yang merupakan usaha atas pemerintah daerah dengan menggandeng masyarakat untuk ikut serta memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pembangunan ekonomi yang berjalan dengan baik maka akan memajukan pertumbuhan ekonomi dengan baik juga. Hal dasar yang berkaitan dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pembangunan

daerah tersebut. Pembangunan yang tertata dengan baik dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat (Aka, 2006).

Pertumbuhan ekonomi adalah inti penting dalam proses pembangunan nasional dan wilayah di Indonesia. Target utama dalam penyusunan rencana pembangunan fisik dan sosial sampai saat ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Melalui pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula di tingkatkan (Sjafrizal, 2012).

Menurut Arsyad (2004, p. 13) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk domestik bruto dengan tidak memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataupun lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah pertumbuhan ekonomi terjadi atau tidak. Mengingat pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga setiap daerah dituntut untuk mampu mengembangkan potensi dari daerah itu sehingga terciptanya keuanggualan dari sektor ekonomi yang ada di daerah dan dapat berdampak satu sama dengan sektor yang lain terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangkaian peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto atau nilai output akhir yang bersumber dari berbagai sektor lapangan usaha di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada

periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (Bahri, Samsul, 2018)

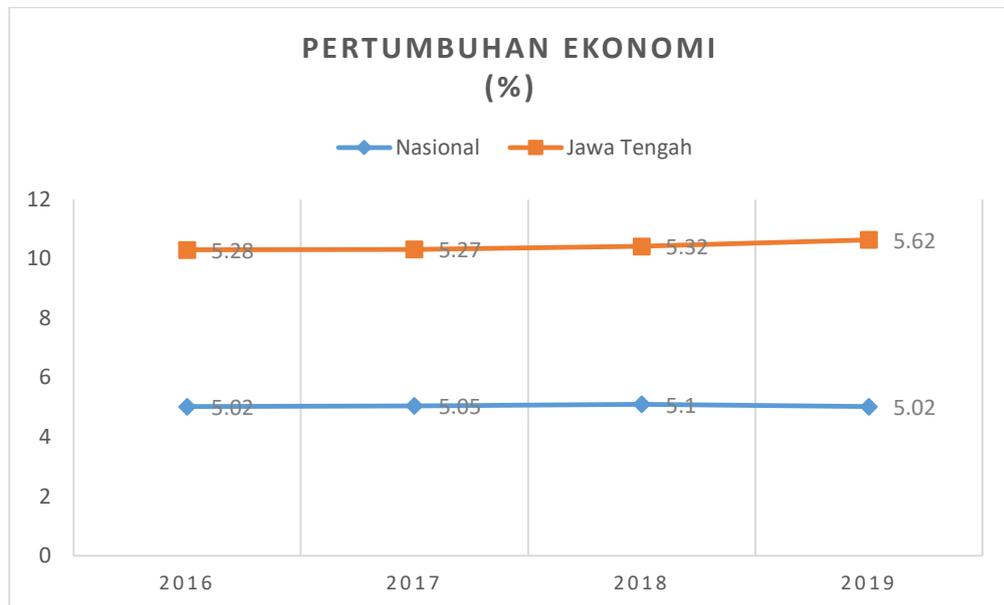
Dari perhitungan sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto yang ada, kondisi ekonomi dari suatu wilayah dapat ditentukan. Suatu daerah dapat dikatakan agraris apabila peran sektor pertanian sangat dominan dalam Produk Domestik Regional Bruto nya, demikian pula sebaliknya dikatakan daerah industri apabila yang lebih dominan adalah sektor industrinya.

Kemakmuran suatu daerah berbeda dengan wilayah yang lainnya. Kegiatan basis dengan peran penggerak utama (prime mover role) dengan maksud pertumbuhan suatu daerah dimana setiap adanya perubahan mempunyai efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Perbedaan yang ada disebabkan oleh struktur ekonomi sebagai faktor utama. Perubahan wilayah untuk yang lebih baik tergantung dari pada usaha-usaha dalam daerah agar menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperluakan (John, 1990)

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor ekonomi yang dominan (Sjafrizal, 2014)

Melalui upaya pembangunan daerah, dapat diambil aspek-aspek yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. Dalam kerangka pembangunan daerah, potensi ekonomi merupakan adanya kesanggupan maupun kemampuan dalam bidang ekonomi di suatu daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Potensi ekonomi tersebut diantaranya dapat berupa sumber daya alam, sumber

daya manusia, letak geografis daerah yang dekat dengan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya (Sudarti, 2009)



**Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provisni Jawa Tengah Tahun 2016-2019**

Sumber: *cjip.jatengprov.go.id*

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dibagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 34,558 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 32.380.678 jiwa (Badan Pusat Statistik). Meskipun merupakan provinsi yang terletak di bagian tengah pulau Jawa namun pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan tren yang relative positif. Menurut data (*cjip.jatengprov.go.id*) pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 5,62% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Di Jawa Tengah terdapat beberapa kabupaten ataupun kota besar yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah. Masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah memberikan konstribusinya dalam setiap sektor dari tujuh belas sektor yang ada dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memilih 2 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan penelitian yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo sebagai objek penelitian. Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo dalam rata-rata peningkatan jumlah PDRB dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan meskipun bertahap setiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah:

| Tahun | PDRB<br>Jawa Tengah | PDRB Kabupaten<br>Cilacap | PDRB Kabupaten<br>Sukoharjo |
|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2016  | 849,099,346         | 40,699,392                | 22,307,982                  |
| 2017  | 893,750,289         | 42,868,160                | 24,163,939                  |
| 2018  | 941,091,136         | 45,073,045                | 25,464,065                  |
| 2019  | 991,913,383         | 47,428,133                | 27,076,442                  |

**Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2016-2019 Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)**

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, 2020*

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diatas Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo juga merupakan daerah yang memiliki kontribusi besar dalam penyumbang PDRB di Jawa Tengah. Dari kedua kabupaten tersebut memiliki jumlah PDRB yang berbeda dalam tahun ke tahun, namun memiliki sektor yang sama dalam penyumbang PDRB masing-masing daerah, yakni ada pada sektor Industri Pengolahan yang mengalami peningkatan pertumbuhan secara bertahap, terlihat pada tabel 1.2. Besar kecilnya perkembangan PDRB Kabupaten Semarang berpengaruh juga terhadap besar kecilnya sumbangan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah.

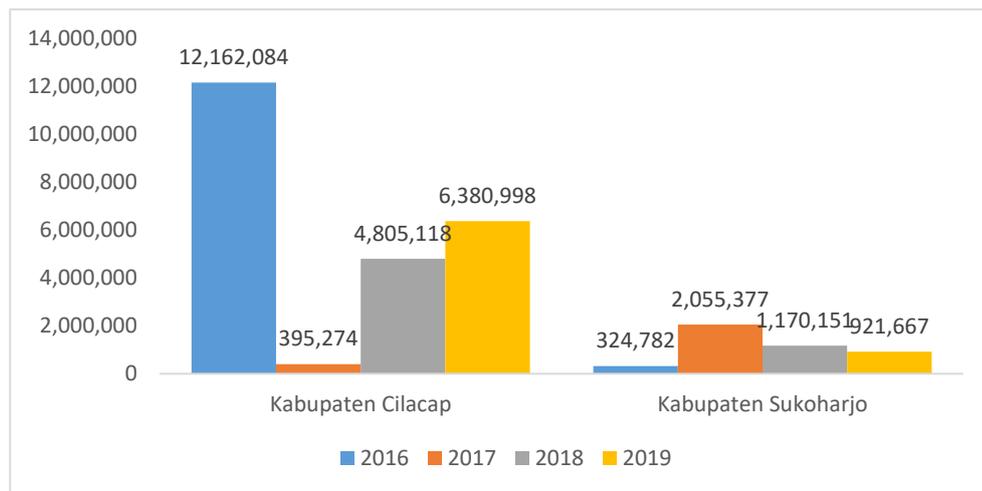
| Tahun | Kab. Cilacap | Kab. Sukoharjo |
|-------|--------------|----------------|
| 2016  | 13,175,441   | 8,735,531      |
| 2017  | 13,700,731   | 9,271,980      |
| 2018  | 14,186,316   | 9,871,778      |
| 2019  | 14,944,642   | 10,428,612     |

**Tabel 1.2 PDRB Sektor Industri Pengelolaan Tahun 2016-2019**

Sumber : BPS-Jawa Tengah, 2020

Investasi juga dapat menjadi faktor pendorong dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam UU no. 25/2007 tentang penanaman modal, dengan tujuan diantaranya sebagai berikut: (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional; (b) menciptakan lapangan pekerjaan; (c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Nasional; (e) meningkatkan kapasitas kemampuan teknologi Nasional; (f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Briwantara, 2018)

Investasi yang merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi di Indonesia dibutuhkan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Purnamasari, 2015). Dalam penelitian ini digunakan istilah Penanaman modal dalam negeri, yang berarti kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo.



**Gambar 1.2. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo (dalam Juta Rupiah) tahun 2016-2019**

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, 2020*

Pada gambar 1.2 dapat dilihat perkembangan realisasi investasi dalam negeri Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yakni tahun 2016-2019. Perubahan investasi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo ini dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi secara nominal. Perkembangan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 dengan realisasi mencapai 395 juta dengan jumlah proyek 17 ini termasuk penurunan angka investasi dari tahun sebelumnya mencapai 12 juta dengan jumlah 17 proyek tetap. Seperti diketahui investasi berbanding terbalik terhadap suku bunga, apabila suku bunga rendah maka investasi akan tinggi dan sebaliknya, hal ini diduga sebagai pemicu perubahan investasi (Sukirno, 2008:125). Selama 4 tahun terakhir PMDN cenderung fluktuatif. Perubahan yang signifikan terhadap PMDN dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi dan fenomena yang sedang terjadi sehingga investor dan juga iklim investasi menjadi menurun sehingga berdampak pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Proporsi naik turunnya pertumbuhan investasi dalam negeri di

Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo tidak berarti pembangunan ekonomi berjalan lambat tetapi bagaimana efisiensi serta produktivitas dari investasi tersebut. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah agar dapat menarik peminat investor untuk menanamkan modalnya dengan meningkatkan fasilitas yang ada sehingga memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya.

Dari setiap kabupaten di provinsi memiliki potensi regional yang dapat dijaga dan di kembangkan agar memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif, karena suatu pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung dari satu sektor saja. Kesemua sektor memegang peranan penting juga dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Penerapan konsep pengembangan struktur wilayah Jawa Tengah diharapkan secara efektif akan memperkecil kepincangan-kepincangan pembangunan dan perbedaan kemakmuran antar wilayah atau daerah. Sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan lebih cepat dapat tersebar ke segenap wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Dari latar belakang diatas seperti diatas, peneliti akan menguraikan baik secara menyeluruh maupun secara terperinci, bagaimana perkembangan sektor ekonomi dalam pembangunan ekonomi serta bagaimana pengaruh sektor basis dan non basis terhadap investasi di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo. Maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Sektor Ekonomi Serta Pengaruh Investasi Terhadap Sektor Basis Dan Non Basis 2 Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor apa yang menjadi basis dan yang termasuk sektor non basis di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo?
4. Tipe daerah apa ketiga kabupaten tersebut jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan (basis) dan sektor non unggulan (non basis) di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui pengaruh sektor basis dan non basis terhadap investasi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo.
4. Mengetahui tipe daerah dari Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Agar penelitian tetap terarah pada permasalahan, maka diperlukan adanya batasan ruang lingkup penelitian yakni lokasi yang dipilih pada penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan objek daerah yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran hingga memaparkan suatu keadaan atau objek. Dalam hal ini mendapatkan gambaran tentang sektor unggulan, struktur ekonomi, hingga tipe daerah pada objek penelitian ini.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan tentang pertimbangan bagi pemerintah mengenai kinerja masing-masing sektor.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi-instansi terkait dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi dan tipe daerah yang dimiliki tiap kabupaten atau kota dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada.